

Strategi Komunikasi dalam Upaya Penerapan *Sustainable Tourism Development* di Pulau Derawan

Communication Strategy in Efforts to Implement Sustainable Tourism Development on Derawan Island

Arvina Sandra, Hairunnisa, Fareis Althalets
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Abstrak

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu inovasi untuk menghadapi transformasi ekonomi pasca migas dan batu bara di Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Sustainable Tourism Development di Kalimantan Timur khususnya pada Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan studi kasus intrinsik yang dilakukan selama periode Agustus 2018 sampai September 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan evaluasi dan koordinasi secara berkelanjutan agar terciptanya pemerintahan terintegrasi khususnya antara Dinas Pariwisata provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam menerapkan Sustainable Tourism Development di Pulau Derawan, yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Koordinasi yang terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan dan masyarakat akan mempermudah alur komunikasi untuk menyampaikan pesan agar mencapai tujuan yang optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat di Pulau Derawan mempermudah suatu inovasi yang masuk, dan dapat membantu menerapkan pembangunan pariwisata sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Sustainable Tourism Development, Pulau Derawan

Abstract

Sustainable tourism development is an innovation to face the post oil and gas and coal economic transformation in East Kalimantan. This study aims to determine and analyze the implementation of Sustainable Tourism Development in East Kalimantan, especially on Derawan Island, Berau Regency. This research uses an intrinsic case study which was conducted during the period August 2018 to September 2018. The results of this study indicate that ongoing evaluation and coordination are still needed in order to create an integrated government, especially between the East Kalimantan Provincial Tourism Office and the Berau Regency Culture and Tourism Office in implementing Sustainable Tourism Development on Derawan Island, which is a National Tourism Strategic Area (KSPN). Integrated coordination between local governments, district governments, stakeholders and communities will facilitate communication channels to convey messages in order to achieve optimal goals. In addition, public awareness on Derawan Island facilitates incoming innovation, and can help implement tourism development in accordance with the principles of sustainability.

Keywords: Communication Strategy, Sustainable Tourism Development, Derawan Island

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memiliki sembilan program prioritas kerja yang dinamakan dengan program Nawacita. Salah satu dari sembilan prioritas Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, salah satunya sektor pariwisata. Sebagai industri jasa, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyumbang devisa, dan membuka lapangan kerja (Kementerian Pariwisata, 2015). Pariwisata dapat dikembangkan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, dimana pada 2015 hingga 2019 ditargetkan tercapai 20 juta kunjungan wisata mancanegara dan 275 juta kunjungan domestik (Putri, 2019).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu inovasi untuk menghadapi transformasi ekonomi pasca migas dan batu bara. Selain itu, sektor pariwisata juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pada masyarakat yang berada disekitar destinasi wisata. Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau *Sustainable Tourism Development* merupakan prinsip keberlanjutan yang mengedepankan keberlanjutan ekologi, sosial dan budaya serta ekonomi (Ardika, 2007). Pariwisata berkelanjutan melibatkan peran masyarakat sebagai subjek untuk mengembangkan destinasi wisata serta meningkatkan perekonomian (Arida, n.d.).

Menurut Sharpley (2002) konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan kolaborasi dari kata Inggris "*Development*", (pembangunan) dan "*Sustainability*" (berkelanjutan). Salah satu pihak yang merumuskan rumusan konseptual tentang hal itu adalah *World Commissions for Environmental and Development* (WCED) dimana pembangunan berkelanjutan

adalah pembangunan yang menjamin pemenuhan kebutuhan setiap generasi dengan tanpa mengorbankan generasi selanjutnya (WCED, 1987).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal (dalam hal kontrol, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan usaha) (Sukma, 2016). Sementara itu, konsep ekowisata menurut G. Sudarto (1998) memiliki lima prinsip yaitu: (1) peduli, bertanggungjawab, dan berkomitmen pada kelestarian lingkungan; (2) pengembangannya berdasarkan musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat; (3) memberikan manfaat kepada masyarakat setempat; (4) menghormati nilai sosial budaya serta tradisi setempat; (5) memperhatikan peraturan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan (Sukma, 2016).

Salah satunya kegiatan ekowisata dilaksanakan di Pulau Derawan yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pulau Derawan merupakan pulau yang memiliki keindahan bawah laut yang diakui oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Hal ini membuat peningkatan kunjungan wisata ke Pulau Derawan meningkat yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat Pulau Derawan menjadi pelaku industri dengan menyediakan jasa akomodasi, kuliner dan pemandu wisata.

Idealnya penerapan *good governance* di Kalimantan Timur akan berjalan jika pemerintah daerah, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat telah terlibat dalam pembangunan. Strategi komunikasi digunakan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pembangunan pariwisata, strategi komunikasi

diharapkan mampu mencapai tujuan yang optimal dalam menyampaikan pesan pembangunan kepada pihak-pihak terkait. Pesan atau tujuan yang optimal merupakan prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Klasik yaitu "*Stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen-elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Cangara, 2013).

Sementara itu, difusi inovasi merupakan penyebaran ide-ide baru yang dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu, dalam jangka waktu tertentu, kepada anggota dari sistem sosial (Annur, 2013). Difusi merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan pesan - pesan yang berupa gagasan baru. Inovasi atau gagasan tidaklah mudah diterima secara instan, melainkan melalui beberapa proses yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu: 1) tahapan pengetahuan (*knowledge*), 2) tahapan mengajak (*persuasion*), 3) tahapan keputusan (*decision*), 4) tahapan implementasi (*implementation*), dan 5) Tahapan konfirmasi (*confirmation*) (Rogers, 2015).

Tahap selanjutnya dalam proses penerimaan ialah persuasi (*persuasion*). Pada tahap ini, ide, gagasan, atau inovasi dipertanyakan untuk menjelaskan tingkat adopsi mereka yang berbeda-beda seperti: 1) *Relative Advantage* (keuntungan relatif), 2) *Compatibility* (kompatibilitas), 3) *Complexity* (kompleksitas), 4) *Trialability* (dapat dicoba), dan 5) *Observability* (dapat diamati) (Rogers, 2015).

Mengenai tingkat atau derajat penerimaan ide-ide baru (*innovation*) menurut Rogers (dalam Cangara, 2013) terbagi atas lima tingkatan, yakni: 1) *Innovator* (pembaharu), 2) *Early adopters* (penerima awal), 3) *Early majority* (penerima

mayoritas awal), 4) *Late majority* (penerima mayoritas lambat), dan 5) *Laggard* (kelompok pengikut).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus berciri kualitatif yang intensif mengamati pada destinasi yang diteliti (Denzin & Yvonna, 2009). Lebih lanjut Denzin & Yvonna (2009) menjelaskan ada tiga jenis studi kasus, yaitu studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*), studi kasus instrumental (*instrumental case study*) dan studi kasus kolektif (*collective case study*). Peneliti menggunakan jenis studi kasus intrinsik untuk memahami strategi komunikasi dalam penerapan *Sustainable Tourism Development* di Pulau Derawan.

Penelitian ini bertujuan untuk menekankan pada kekhususan karakteristik objek dan bukan dikarenakan kasus ini mewakili kasus lain atau menggambarkan sifat dan masalah tertentu (Denzin & Yvonna, 2009). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1979) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber data primer penelitian ini. Peneliti menunjuk informan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan beberapa pertimbangan dan karakteristik tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah), baik arsip Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Pariwisata Kabupaten Berau, serta dokumentasi berupa foto terkait *Sustainable Tourism Development* di Kalimantan Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi

Rumusan arah kebijakan dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur mencakup empat aspek, aspek pertama pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Rumusan arah kebijakan program pembangunan ini telah selaras dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2011 - 2025.

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Derawan, salah satunya Pulau Derawan, dalam program pembangunannya harus secara hirarki dan sistematis antara pusat, provinsi, hingga kabupaten. Dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2036 Pulau Derawan termasuk pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam KPP 3 yaitu kawasan pesisir kepulauan yang bertema wisata bahari.

Program pembangunan pariwisata telah selaras dengan visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur. Pariwisata masuk pada misi ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada strategi enam percepatan transformasi ekonomi arah kebijakan tahun 2017-2018 pengembangan

ekowisata. Program pembangunan ini telah selaras dengan penetapan visi dan misi dari pembangunan pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai konsep pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan tiga aspek tersebut, visi kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata minat khusus yang berbasis alam dan budaya menuju kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan salah satunya meningkatkan kerjasama antara pemerintah provinsi, melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta dengan industri pariwisata di Indonesia termasuk yang ada di luar negeri guna terciptanya sinergitas pengelolaan kepariwisataan secara efektif dan berkesinambungan.

Kesenjangan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Berau akan menghambat jalannya *good governance* dalam membangun taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur. Sebagai kabupaten yang dianugerahi dengan hiu paus membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau bersama OPD lain (Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Berau) bekerja sama dengan mitra dari WWF Indonesia dalam mengembangkan wisata bahari di Pulau Derawan terkhusus wisata hiu paus dengan memberikan *code of conduct* atau panduan interaksi.

Panduan berinteraksi ini diberikan oleh WWF Indonesia dengan tujuan agar wisatawan dapat bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas wisata. Panduan berinteraksi ini tidak hanya dapat dijumpai pada destinasi wisata Pulau Derawan atau Talisayan saja yang merupakan wilayah hiu paus mengembara, melainkan juga dapat dijumpai pada surat kabar Berau Post. Berau

Post menjadi mitra pemerintah Kabupaten Berau dan WWF Indonesia untuk memberikan informasi kepada masyarakat pembaca dan ini merupakan strategi komunikasi yang digunakan Pemkab Berau dalam mengembangkan pariwisata daerahnya, serta memberikan informasi kepada wisatawan agar menjadi wisatawan yang bertanggung jawab.

Potensi daerah yang dimiliki oleh Kalimantan Timur akan dibantu pengembangannya dengan dukungan dari organisasi perangkat daerah yang membantu menjalankannya dengan optimal. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran sentral pada perkembangan pariwisata di Kalimantan Timur dalam upaya mengkoordinasi dan mengatur sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata di Kalimantan Timur sangat bergantung dengan dukungan organisasi atau kelembagaan yang kuat agar optimal dalam menjalankannya.

Peran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dalam perkembangan pembangunan pariwisata. Kenyataan di lapangan ialah, Dinas Pariwisata provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa minimnya kerjasama yang dibangun antar lembaga dan *stakeholder* dalam pembangunan pariwisata. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang ilmu pariwisata pun menjadi kendala, maka membuat strategi komunikasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk menerapkan *Sustainable Tourism Development* menjadi terhambat, karena minimnya sumber daya manusia yang memahami tentang hal ini. Kelemahan ini patut menjadi prioritas utama yang harus ditangani untuk melakukan pembangunan kepariwisataan di provinsi Kalimantan Timur. Adanya sumber daya manusia yang memahami tentang pariwisata akan membantu berjalannya komunikasi yang optimal.

Alur komunikasi yang digunakan untuk membangun kerjasama antar kabupaten/kota seperti Dinas Pariwisata provinsi Kalimantan Timur, dapat memberikan arahan, menyampaikan informasi, dan memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai bentuk komunikasi (*Downward Communication*). Bentuk komunikasi ini sebagai arahan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program berupa prinsip *Sustainable Tourism Development* di Pulau Derawan sebagai kawasan KSPN. Begitu juga sebaliknya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau akan memberikan informasi kepada atasan agar dapat memecahkan permasalahan dalam menjalankan prinsip dari pembangunan pariwisata, bentuk komunikasi ini dinamakan dengan (*Upward Communication*).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini dapat dijadikan acuan pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi transformasi ekonomi di masa yang akan datang sebagai pengganti migas dan batu bara. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan wewenang penuh pada daerah dalam mengembangkan daerahnya.

Sustainable Tourism Development dapat menjadi solusi untuk pengembangan Provinsi Kalimantan Timur agar membantu taraf hidup masyarakat di wilayah destinasi pariwisata, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan daerah dari hasil kunjungan wisata. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya adalah tuntutan bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan memberikan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Penerapan *Good Governance* akan berjalan dengan optimal jika pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkhusus pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur beserta OPD lainnya mampu

menjalankan kerjasama secara sinergis dalam membangun pariwisata di Kalimantan Timur.

Prinsip dari *Sustainable Tourism Development* dapat membantu mewujudkan *goals* pembangunan provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur perlu mendapatkan perhatian khusus agar terciptanya ekonomi hijau sebagai wujud misi dari Kalimantan Timur. Penguatan alur komunikasi dan koordinasi secara hirarki mampu membantu menciptakan prinsip *Sustainable Tourism Development* di destinasi unggulan Kalimantan Timur terkhusus Pulau Derawan yang memiliki banyak kekayaan alam, dengan prinsip keberlanjutan mampu menopang perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Sustainable Tourism Development

Penerapan *Sustainable Tourism Development* di Pulau Derawan secara hasil temuan lapangan masih belum optimal. Penerapan *Sustainable Tourism Development* masyarakat telah sadar bahwa daerahnya merupakan destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara dan nasional. Masyarakat Pulau Derawan yang dulunya profesinya sebagai nelayan saat ini telah berpindah mata pencariannya sebagai pelaku industri pariwisata. Hampir sebagian masyarakat di Pulau Derawan membuka usaha di bidang jasa pariwisata, ada yang sebagai *tour guide*, pelaku akomodasi, jasa transportasi, dan kuliner.

Secara *ecological sustainability* Potensi destinasi pariwisata di Pulau Derawan merupakan laut yang indah dengan keberagaman biota laut. Aktivitas wisata banyak dilakukan oleh wisatawan di laut dengan cara *snorkeling* dan *diving* di beberapa area. Jika wisatawan membuang sampah di laut akan mengganggu ekosistem yang ada di Pulau Derawan. Maka dalam upaya penanggulangan

sampah, pemerintah kampung Pulau Derawan mengeluarkan peraturan kampung berupa pengelolaan sampah. Menugaskan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Langkawit Pulau Derawan untuk mengurus urusan pengelolaan sampah di Pulau Derawan. Pengelolaan ini baru berjalan sekitar 5 bulan, dengan memungut biaya dari pemilik *cottage*, *homestay*, *resort*, dan rumah tangga dengan biaya yang berbeda tiap bulannya.

Selain atraksi melihat penyu yang terdapat di Pulau Derawan, hiu paus menjadi subjek unggulan yang dapat dilihat oleh wisatawan. Keberadaan hiu paus di Pulau Derawan menjadi suatu anugerah bagi Pulau Derawan, karena menjadi destinasi wisata unggulan yang terus didatangi oleh pengunjung. Hiu paus di Pulau Derawan ada pada bulan - bulan tertentu saja menurut hasil riset dari WWF Indonesia. Keberadaan hiu paus di Pulau Derawan, menggerakkan WWF Indonesia sebagai mitra masyarakat untuk menjaga dan melestarikan raksasa pengembara samudra (hiu paus). WWF Indonesia sebagai mitra masyarakat bekerjasama dengan Asosiasi *Guide* se Derawan (AGSD) untuk memberikan pelatihan tentang berwisata dengan hiu paus. Pelatihan ini diberikan agar pemandu (*guide*) memahami dan mengadopsi bagaimana pedoman cara berinteraksi dengan hiu paus. *Guide* di Pulau Derawan mendapatkan sumber informasi dari WWF Indonesia tentang memandu wisatawan agar dapat berwisata bertanggung jawab, dengan pedoman yang diberikan oleh WWF Indonesia berupa pelatihan agar *guide* dapat mengimplementasikan saat di lapangan. WWF Indonesia tergerak untuk membuat pedoman berinteraksi dengan hiu paus agar hiu paus tidak merasa terganggu dengan aktivitas wisata yang dilakukan oleh wisatawan. WWF Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Berau, untuk menyusun *code of conduct* dengan hiu paus. WWF Indonesia memberikan pengetahuan kepada *guide* di Derawan untuk

mengadopsi pesan yang di berikan oleh WWF Indoensia, agar dapat mengimplementasikan di lapangan.

Keberlanjutan ekologi Pulau Derawan akan terus terjaga jika regulasi di implemntasikan di lapangan secara konsisten. Evaluasi dan koordinasi dari hasil penerapan regulasi akan membantu berjalannya *good governance* di Kalimantan Timur. Masyarakat Pulau Derawan telah menyadari bahwa keberlanjutan ekologi itu sangatlah penting bagi wilayahnya yang merupakan destinasi wisata. Namun kesadaran ini masih belum konsisten, terbukti dengan adanya bangunan di atas laut yang berdiri digunakan untuk membangun penginapan (*cottage*). Kebanyakan bangunan di atas air dapat dipastikan tidak memiliki izin membangun bangunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 pasal 21 ayat 2 huruf a, tentang bangunan gedung. Selain melanggar regulasi dari pemerintah, secara tidak langsung bangunan diatas air ini mengganggu habitat dari ekosistem yang ada di Pulau Derawan.

Social and culture sustainability salah seorang dari masyarakat Pulau Derawan menjadi relawan dalam koservasi penyu. Tokoh masyarakat tersebut tergerak karena menyadari bahwa tujuan wisatawan datang ke Pulau Derawan untuk melihat potensi alam yang dimiliki, tetapi masih saja ada pemanfaatan penyu secara ilegal yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata. Relawan tersebut kemudian didukung oleh lembaga swadaya masyarakat mengkampanyekan agar masyarakat dan wisatawan dapat berkontribusi dalam konservasi tukik. Kontribusi tokoh masyarakat lokal membantu menyadarkan masyarakat lokal untuk saling mengingatkan dan menyadarkan bahwa penyu dianggap sebagai binatang tertua sebelum adanya manusia atau dalam bahasa Bajo disebut dengan "Saka Bokko". Kepercayaan masyarakat lokal terhadap penyu ini mentebutkan bahwa penyu harus dilindungi karena menjadi penyebar rejeki bagi masyarakat

di Pulau Derawan. Hal ini membuat relawan konservasi dari masyarakat memberikan informasi dan mengajak masyarakat serta wisatawan untuk berkontribusi terhadap kelestarian dari penyu di Pulau Derawan dengan cara metode media tradisional.

Media tradisional atau seni tradisional dapat di jadikan sebagai alat komunikasi untuk memberikan pesan kepada masyarakat, hal ini dapat mempermudah penyampaian pesan karena tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai cermin kehidupan masyarakat desa. Selain itu, seni tradisional sifatnya menghibur sehingga lebih mudah mempengaruhi sikap pada masyarakat setempat. Seperti masyarakat Pulau Derawan yang memiliki seni tari yang dinamakan dengan Tari Daling Sumping yang dapat disaksikan pada saat pernikahan dan penyambutan tamu. Pada tarian ini mengandung syair - syair yang berhubungan dengan pesan untuk membangun keluarga dan menjaga alam sebagai sumber penghidupan keluarga. Cerita rakyat "Saka Bokko" di Pulau Derawan memberikan pesan kepada masyarakat setempat untuk mengingatkan bahwa penyu adalah binatang yang dianggap lebih tua dari manusia dan sebagai binatang yang menjaga laut Pulau Derawan.

Seni tradisional masyarakat Pulau Derawan mendorong lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari TNC / *The Nature Conservancy* yang bekerja sama dengan WWF Indonesia membantu mengkampanyekan tentang kelestarian dari penyu sisik dan penyu hijau yang terdapat di Pulau Derawan, dengan cara memberikan selebaran berupa manfaat dari pelestarian penyu untuk alam. Pelestarian ekosistem yang ada di Pulau Derawan akan membantu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Pulau Derawan, semakin di lestarian maka akan menjadi lebih sejahtera. Secara sosial masyarakat Pulau Derawan mampu

menerima suatu inovasi yang masuk di masyarakat, melalui lembaga suwadaya masyarakat, WWF Indonesia, pemerintahan, dan dengan metode belajar kearifan lokal. Masyarakat Pulau Derawan sangat menerima adanya inovasi yang masuk di kalangan masyarakat, menerima tanpa menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lain yang menjadi subjek sebagai pelaku industri pariwisata. Berdasarkan hasil temuan lapangan, peneliti melihat beberapa inovasi yang diberikan oleh relawan konservasi tukik untuk melepaskan tukik agar hidup di alam bebas tanpa harus menunggu usia tukik 3 bulan hingga 5 bulan. Awalnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena tukik/ penyu dianggap atau di percaya sebagai binatang yang membawa berkah bagi Pulau Derawan, maka masyarakat tidak setuju jika tukik di lepas langsung ke habitat asilnya sebelum 3 bulan hingga 5 bulan masyarakat merasa takut tukik akan dimakan oleh predator yang ada di laut. Namun relawan konservasi tukik memberikan informasi kepada masyarakat, jika ini tidak dilakukan maka tukik akan hidup secara ketergantungan karena dari kecil telah diurus dengan campur tangan manusia dan akan mengganggu daya tahan (*survival*) dari tukik tersebut.

Indikator ketiga pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah keberlanjutan ekonomi. Masyarakat Pulau Derawan telah menyadari bahwa kunjungan wisata yang datang ke daerahnya membawa keuntungan bagi ekonomi pelaku industri kuliner, akomodasi, dan transportasi. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pariwisata membantu untuk menambah pendapatan mereka. Rata - rata masyarakat Pulau Derawan menyadari bahwa perekonomiannya berasal dari industri pariwisata. Program prioritas Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kunjungan wisata di Pulau Derawan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Pariwisata diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

lokal, karena tidak lagi menjadi objek yang dilihat oleh wisatawan melainkan menjadi subjek dalam melaksanakan aktivitas pariwisata.

Kesadaran masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan, masyarakat yang sadar akan hal ini membantu mempermudah jalannya alur komunikasi dalam menerapkan strategi komunikasi yang optimal dalam mencapai tujuan. Perlu perhatian khusus pada masyarakat Pulau Derawan agar pemerintah dan *stakeholder* mampu mengembangkan Pulau Derawan menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Timur. Pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu diterapkan secara khusus pada daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) karena ini merupakan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur agar dapat menjadi tujuan wisata pilihan bagi wisatawan mancanegara dan nusantara untuk dikunjungi. Transformasi ekonomi Kalimantan Timur juga akan terbantu dengan adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Timur, kunjungan wisatawan yang datang akan meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat untuk kesejahteraan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam upaya penerapan *Sustainable Tourism Development* di Kalimantan Timur terkhusus pada Pulau Derawan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional secara temuan lapangan masih belum optimal dalam menjalankan strateginya. Kurangnya koordinasi dan komunikasi terhadap evaluasi kerja secara berkala membuat terhambatnya penerapan prinsip *Sustainable Tourism Development* di Pulau

Derawan. Secara tertulis di dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Berau telah selaras dengan kebijakan yang ada, namun dalam menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan masih kurang perhatian antara provinsi kepada kabupaten. Hambatan penerapan prinsip *Sustainable Tourism Development* ini terjadi karena media komunikasi yang di gunakan masih minim dan belum dapat menjangkau semua kalangan dalam menyebarkan informasi berupa prinsip *Sustainable Tourism Development* di Kalimantan Timur.

Pelaku industri pariwisata di Pulau Derawan telah menyadari bahwa daerahnya sebagai destinasi pariwisata unggulan, menyadari hal itu membuat pelaku industri pariwisata di Pulau Derawan mengimplemtnasi inovasi yang mereka dapat melalui sumber belajar dari NGO, dan kearifan lokal. Tahapan ini telah sampai pada tahapan mengadopsi inovasi tersebut Namun, hambatan dalam mengadopsi inovasi berupa *Sustainable Tourism Development* di Pulau Derawan yang di hadapi oleh pelaku industri pariwisata berupa hambatan pengetahuan dalam berbahasa. Wisatawan yang datang ke destinasi wisata Pulau Derawan rata - rata di kunjungi oleh wisatawan mancanegara yang memiliki perbedaan bahasa dengan pelaku industri pariwisata. Perbedaan bahasa ini membuat hambatan dalam berinteraksi dan komunikasi pada wisatawan mancanegara. Selain hambatan berbahasa, pelaku industri pariwisata di Pulau Derawan membutuhkan suatu pendampingan dalam mengadopsi inovasi *Sustainable Tourism Development* dari pihak pemerintah agar tetap mengimplementasikan inovasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Annur, A. M. (2013). DIFUSI DAN ADOPTI INOVASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Difusi dan Adopsi Inovasi dalam Layanan “Mbela Wong Cilik” Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) di Kabupaten Sragen). *Journal of Rural and Development*, IV(1), 69–82.
- Ardika, I. W. (2007). *Pustaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Arida, I. N. S. (n.d.). *Pariwisata Berkelanjutan*. Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf
- Cangara, H. H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Denzin, N. K., & Yvonna, L. S. (2009). *Hand Book of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pariwisata. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019*. Jakarta.
- Putri, N. (2019). Kemenpar Diskusikan Pengembangan Ekowisata Berbasis Sungai. Retrieved February 16, 2019, from detikTravel website: <https://travel.detik.com/travel-news/d-4532330/kemenpar-diskusikan-pengembangan-ekowisata-berbasis-sungai>
- Rogers, E. M. (2015). Evolution: Diffusion of Innovations. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edi, Vol. 7). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.81064-8>
- Sharpley, R. (2002). Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus. *Tourism Management*. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(01\)00078-4](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00078-4)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, A. (2016). *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali*. Bali: Pustaka Larasan.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.